

Pesan dari *Editor-in-Chief*: Riset psikologi sosial yang dibutuhkan Indonesia

Bagus Takwin

Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Depok

Abstrak

Berangkat dari latar belakang bagaimana peranan psikologi sosial dalam penyelesaian masalah-masalah di masyarakat, pada bulan April 2019, Jurnal Psikologi Sosial (JPS) dan Ikatan Psikologi Sosial (IPS) menyelenggarakan dua diskusi dengan topik "Identifikasi Kebutuhan Riset Psikologi Sosial di Indonesia". Pertanyaan yang diajukan: Riset psikologi sosial apa yang dibutuhkan oleh Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan identifikasi kebutuhan riset psikologi sosial di Indonesia yang didasari identifikasi terhadap masalah sosial dan antisipasi kemungkinan-kemungkinan perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Tulisan ini memaparkan sebagian hasil dari dua diskusi itu tentang identifikasi kebutuhan riset psikologi sosial di Indonesia, mulai dari mengenali tuntutan yang ditujukan kepada Indonesia sebagai sebuah negara, mengenali kondisi aktual yang berlangsung, kemudian usulan riset psikologi sosial yang dibutuhkan Indonesia.

Kata kunci: identifikasi riset psikologi sosial, peran psikologi sosial, penerapan psikologi sosial

Abstract

Addressing the question of social psychology role in solving problems that exist in society, in April 2019, Jurnal Psikologi Sosial (JPS) and Ikatan Psikologi Sosial (IPS) held two discussions on the topic entitled "Identification of Social Psychology Research Needs in Indonesia". Within this discussion, a question was formulated: What kind of social psychological research that is needed in Indonesia? To answer this question, it is necessary to identify the needs based on the identification of social problems and anticipation of possible changes that occur in Indonesian society. This paper presents a part of the results of the two discussions about the identification of research needs in Indonesia. It starts from recognizing the demands addressed to Indonesia as a country, then recognizing the actual conditions that took place, then proposing social psychological research needed by Indonesia.

Keywords: identification of social psychology research, the role of social psychology, the application of social psychology

Pendahuluan

Sejarah mencatat, psikologi sosial memiliki peran dan kontribusi dalam mengembangkan masyarakat di berbagai negara. Bidang ini memiliki banyak kegunaan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Psikologi sosial terapan berusaha meningkatkan kualitas hidup orang-orang secara terus menerus. Dari waktu ke waktu, para ilmuwan psikologi sosial menawarkan dan menerapkan temuan-temuan mereka. Kini usaha itu mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Bahkan, ilmuwan psikologi sosial lebih dituntut untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat.

Bagi psikologi sosial itu, penerapan di masyarakat menjadi ajang untuk mengembangkan dan memperkuat diri. Menerapkan pengetahuan dan metode ilmiah membuat ilmuwan psikologi sosial memiliki

perlengkapan yang baik untuk menghadapi masalah dan mencari solusi. Psikologi sosial tidak akan menjadi seperti sekarang jika dunia tidak mengalami masa-masa ketegangan dan konflik seperti Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin yang mengikutinya (Buschini, Guimond, & Breakwell, 2010). Berbagai temuan dan teori berharga lahir sebagai jawaban atas kebutuhan akan reaksi cepat dan efisien selama krisis atau sebagai respons terhadap masalah masyarakat.

Lebih dari menerapkan teori, beredar juga pemikiran yang menyatakan adanya kebutuhan untuk mengubah dan memfokuskan kembali psikologi sosial ke masyarakat, untuk ikut serta berkontribusi menyelesaikan masalah pembangunan seperti mobilisasi sosial, keluarga berencana, pengembangan pemuda, perencanaan tenaga kerja, perawatan kesehatan primer, pembangunan pedesaan, kebersihan dan desain lingkungan (Akin-Ogundeji, 1991). Bahkan ahli psikologi sosial dituntut untuk menjadi pemeran

utama di sana, dan penekanannya harus terletak pada penerapan hasil riset (Bandawe, 2010). Psikologi sosial dituntut untuk dapat menawarkan penjelasan mengenai perubahan sosial dan para ahlinya harus ikut serta dalam menghasilkan perubahan positif di masyarakat.

Tuntutan itu berangkat dari analisis ahli-ahli psikologi sosial terhadap jalannya sejarah psikologi sosial (di antaranya Blackler, 1984; Jahoda, 1983; Omari, 1983; Fishbein, 1997; McGuire, 1997; Moghaddam, Bianchi, Daniels, Apter, & Harré, 1999; Bandawe, 2010). Menurut mereka, sejarah psikologi sosial telah dirundung krisis yang didasari pendekatan yang tidak memadai dalam memahami perilaku manusia. Sebagian dari krisis itu mencuat dan bergema menjadi seruan agar kajian di lapangan menjadi lebih relevan (Bandawe, 2010). Psikologi sosial dituduh didominasi isu-isu sepele dan dangkal (Fishbein, 1997; McGuire, 1997). Krisis itu dikaitkan dengan keterpakuan studi psikologi sosial pada beberapa kriteria riset tradisional seperti konsistensi internal dengan mengorbankan kepentingan lain seperti kebaruan dan nilai pragmatis (McGuire, 1997). Dengan sumber daya terbatas, psikologi sosial sulit terlibat dalam studi dan penjelasan yang tidak membahas isu yang relevan dengan kenyataan dan praktik di masyarakat. Tuntutan ini menjadi lebih mendesak di negara berkembang yang memiliki masalah seperti kemiskinan, berkurangnya harapan hidup dan penyakit (Omari, 1983).

Dalam sejarah pemikiran psikologi sosial, kita temukan juga gugatan terhadap banyak studi psikologi sosial yang dianggap sebagai kepentingan intelektual pribadi dengan mengorbankan pemenuhan kebutuhan nyata di masyarakat. Dengan kemiskinan yang masih tinggi dan isu-isu yang sangat mendesak, terlibat dalam debat intelektual tanpa menangani masalah-masalah nyata dianggap kemewahan untuk ilmuwan psikologi sosial. Dalam banyak hal, psikologi sosial sebagai subjek akan semakin dievaluasi dengan standar dan kriteria manfaat praktisnya (Bandawe, 2010).

Saat ini, keyakinan bahwa psikologi sosial memiliki hal berharga untuk ditawarkan bertabrakan dengan kenyataan kurangnya kontribusi psikologi sosial di masyarakat. Semestinya, psikologi sosial dapat berkontribusi di masyarakat karena sifatnya sebagai studi tentang individu dan proses sosial yang dapat menambah pengetahuan tentang masalah dunia nyata (Blackler, 1984). Psikologi sosial punya peluang unik untuk berdampak positif dalam kehidupan manusia mengingat penekanan filosofisnya pada pembangunan manusia (Moghaddam et al., 1999). Persoalannya sekarang, bagaimana peluang itu diambil dan diupayakan menjadi wujud konkret kontribusi positif psikologi sosial di masyarakat.

Situasi yang sama dialami oleh psikologi sosial di Indonesia. Bagaimana ahli psikologi sosial Indonesia meresponnya? Lebih khusus lagi, pertanyaannya: Riset psikologi sosial apa yang dibutuhkan oleh Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan identifikasi kebutuhan riset psikologi sosial di Indonesia.

Identifikasi ini mencakup juga identifikasi terhadap masalah sosial yang ada di Indonesia. Selain itu, kita perlu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan perubahan yang terjadi di masyarakat yang dampaknya signifikan menuntut orang-orang di masyarakat melakukan penyesuaian.

Berangkat dari latar belakang masalah ini, pada April 2019, Jurnal Psikologi Sosial (JPS) dan Ikatan Psikologi Sosial (IPS) menyelenggarakan dua diskusi dengan topik "Identifikasi Kebutuhan Riset Psikologi Sosial di Indonesia". Topik ini penting untuk IPS dan JPS karena terkait dengan peran IPS dan JPS dalam upaya menghasilkan pengetahuan psikologis sosial dan penerapan pengetahuan itu di Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Diskusi itu dihadiri oleh para editor Jurnal Psikologi Sosial. Selain saya, turut hadir Dr. Zainal Abidin, Dr. phil. Idhamsyah Eka Putra, Dr. Mirra Noor Milla, Whinda Yustisia, M.Si, dan Joevarian Hudiyana, M.Si. Dalam editorial edisi kali ini, JPS memaparkan apa yang dikemukakan dalam dua diskusi itu.

Tuntutan

Identifikasi masalah bisa mulai dari mengenali tuntutan yang ditujukan kepada Indonesia sebagai sebuah negara. Tuntutan itu, salah satunya, muncul dari keinginan dan harapan terhadap Indonesia. Banyak harapan bahwa Indonesia nanti dapat menjadi negara yang maju, menjadi salah satu negara yang memiliki kualitas pendidikan yang baik, penguasaan teknologi yang tinggi yang diciptakan oleh warga negara Indonesia. Keinginan dan harapan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang aparaturnya bebas dari perilaku korupsi, serta menjadi negara yang mandiri dan berberpengaruh, juga banyak dikemukakan dan menjadi visi dari hampir setiap periode pemerintahan. Harapan lainnya: Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kecerdasannya unggul dan dapat bersaing baik dengan orang dari bangsa-bangsa lain di dunia. Lalu, harapan Indonesia menjadi negara yang warga negaranya memiliki kualitas dan kepuasan hidup yang tinggi, sejahtera, serta memiliki kekuatan dan keutamaan karakter yang membentuk kebahagiaan. Tak kalah banyak, dikemukakan harapan bahwa Indonesia menjadi masyarakat yang rukun dalam keragaman budaya dan keyakinan, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etis.

Kondisi Aktual

Dalam kenyataannya, ada banyak kondisi yang bisa menjadi kendala dan hendaya dari pencapaian kondisi ideal Indonesia itu. Untuk menghemat waktu, di sini hanya dikemukakan empat kondisi yang sangat relevan dengan psikologi sosial: (1) perubahan pasar kerja nasional dan internasional yang berdampak

signifikan pada permasalahan tenaga kerja Indonesia; (2) kondisi birokrasi dan SDM di pemerintahan yang masih belum memadai demi keberfungsian selayaknya kondisi ideal yang diharapkan; (3) situasi sosial-politik dan potensi konflik yang bisa berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan orang Indonesia; dan (4) kondisi sosial yang masih mengandung banyak kesulitan dan kemalangan sosial yang berdampak pada berbagai gangguan dan penyimpangan perilaku individual.

Perubahan Pasar Kerja dan Dampaknya pada Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia

Kita bisa saksikan Indonesia saat ini berhadapan dengan berbagai persoalan ketenagakerjaan, terutama kesenjangan antara karakteristik kebanyakan tenaga kerja yang ada dan tuntutan keterampilan kerja yang baru. Ada banyak permintaan keterampilan okupasional atau keahlian yang pada sepuluh tahun atau bahkan lima tahun yang lalu tidak ada. Beberapa jenis keterampilan sulit didapatkan dari tenaga kerja yang ada. Kesenjangan itu berdampak pada penyerapan tenaga kerja di pasar kerja. Di satu sisi, ada banyak pekerja yang menganggur. Tetapi di sisi lain, banyak jabatan yang tak dapat diisi oleh pekerja karena jenis keterampilan-pilannya tidak dimiliki oleh mereka. Kesenjangan itu akan semakin melebar di masa mendatang jika tidak segera ada penanganan khusus untuk mengatasinya. Laju perubahan di pasar kerja dalam 10 tahun terakhir mengalami percepatan yang tinggi. Industri dunia berubah cepat dan memiliki efek yang sangat besar bagi lapangan kerja di Indonesia, karena industri dunia selalu terkait dengan sistem sosial-ekonomi, geopolitik, dan demografis. Perubahan industri dunia berdampak pada perubahan banyak hal, terutama lapangan pekerjaan. Akan ada banyak pekerjaan yang muncul di masa depan namun akan banyak juga pekerjaan yang hilang.

Perubahan gaya dan cara kerja pun akan terjadi sejalan dengan perubahan dinamika dan pola hubungan di dunia. Ini akan menghasilkan perubahan besar dalam fleksibilitas kerja karena baik jenis, cara, tempat, peralatan maupun hubungan kerja berubah-ubah dalam waktu cepat sehingga membuat orang cenderung fleksibel dalam bekerja. Fleksibilitas kerja ini diramalkan akan menjadi faktor demografi terbesar yang mempengaruhi perubahan industri pada rentang waktu 2019-2030. Ini terkait juga dengan meningkatnya jumlah kelas menengah dan demografi orang muda yang juga menghasilkan orientasi, gaya dan cara kerja baru dalam pasar kerja. Perubahan industri dan keterampilan kerja serta kelompok jabatan juga akan mengalami perubahan di rentang waktu 2019-2030. Perubahan pada faktor demografis dan teknologi berdampak pada perubahan permintaan keterampilan okupasional. Seberapa siapkah Indonesia menghadapi perubahan-perubahan itu? Apaantisipasi yang perlu dilakukan untuk tahu

bagaimana menyambut masa depan itu? Riset diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Kondisi Birokrasi dan Sumber Daya Manusia dalam Birokrasi

Gaung reformasi birokrasi sudah cukup lama berkumandang di Indonesia, tetapi sampai kini masih banyak permasalahan di dalam birokrasi kita. Masih banyak tuntutan mengenai perbaikan birokrasi yang dikeluhkan. Kita temukan tuntutan terhadap pelayanan yang lebih baik karena pada kenyataannya, kondisi pelayanan publik masih belum memadai. Banyak pihak mengidentifikasi bahwa kebanyakan birokrasi di Indonesia masih buruk dan jauh dari ideal. Permasalahan ini tergolong kompleks karena mencakup banyak aspek, komponen, unsur, dan dimensi dari birokrasi. Sebagai contoh, Indonesia masih berhadapan dengan persoalan kesesuaian antara sistem desentralisasi yang dijalankan melalui otonomi daerah dan kebijakan nasional, sehingga reformasi birokrasi tidak selesai hanya di tingkat nasional namun juga harus mampu menyentuh dan mendorong reformasi hingga tingkat daerah.

Secara umum, efektivitas dan efisiensi birokrasi masih tergolong rendah meski sudah ada perbaikan dan peningkatan di beberapa wilayah. Birokrasi Indonesia yang tidak efisien berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang kurang efektif. SDM di birokrasi yang memberikan pelayanan publik banyak yang kurang berkompeten di bidangnya. Dapat dikatakan juga bahwa mentalitas melayani warga juga masih belum mumpuni. Watak para aparatur negara sebagai pejabat yang memiliki ke-wenangan lebih dominan dibandingkan watak sebagai pelayan publik. Beredar banyak cerita bahwa yang ada di lapangan aparatur bukan melayani tetapi dilayani.

Permasalahan lainnya adalah pengaruh politik yang kuat terhadap birokrasi. Pengaruh itu disinyalir menjadi penyumbang bagi masih terhambatnya kinerja birokrasi. Pengaruh itu memperlemah birokrasi dalam merespon agenda dan tantangan dalam pembangunan nasional. Kondisi ini dianggap sebagai akibat dari sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia, juga sistem kepartaian yang dianut Indonesia. Ini memungkinkan adanya dampak pada kinerja aparatur yang tidak netral karena aparatur negara terintervensi oleh kepentingan partai yang dinilai berjasa dalam menjadikan mereka pejabat. Sebagaimana diidentifikasi oleh Daniarsyah (2015), ditemukan kasus pergantian pejabat eselon I dan II yang memiliki afiliasi atau mencari afiliasi politik kepada Menteri. Adanya hukum dan peraturan perundang-undangan yang ambigu, bahkan kontradiktif, juga dapat dilacak sumbernya pada sistem kepartaian Indonesia yang menghasilkan Dewan Perwakilan Rakyat yang sarat dengan pertentangan kepentingan antar berbagai faksi yang ada di sana.

Situasi Sosial-Politik dan Potensi Konflik

Sebagai negara multi-suku dan multi-agama, serta mencakup juga kelompok-kelompok minoritas dan status sosial-ekonomi yang beragam, Indonesia memiliki potensi konflik yang bukan tidak mungkin menjadi aktual jika tidak dikelola dengan baik. Potensi ini bisa membesar dalam situasi politik yang memanas, seperti menjelang pemilihan umum di semua lapisan. Menjaga integrasi Indonesia merupakan usaha yang perlu terus menerus dilakukan secara aktif. Jika tidak, kerusakan integrasi sosial dan politik dapat terjadi.

Hingga saat ini, ada indikasi dari terganggunya integrasi sosial. Di antaranya kemunculan sektarianisme yang tampil dalam bentuk kelompok-kelompok yang secara intensif mengutamakan keyakinan sektarian dan etnik, serta mendominasinya kinerja kekuasaan modal dan oligark sehingga pemerintahan Indonesia bekerja seperti oligarki. Cukup banyak bisa kita temukan aksi kekerasan dan agenda kelompok sektarian yang menentang pluralisme serta kecenderungan perilaku ekonomi yang tidak mengindahkan rasa keadilan. Bisa kita temukan juga di Indonesia bentuk regulasi yang mengutamakan nilai moral kelompok tertentu baik dalam skala nasional maupun lokal, tindakan kekerasan mengatasnamakan nilai-nilai agama, konflik horisontal antar kelompok yang berlabel agama, serta pertikaian antar kelompok berlabel suku. Semua ini merupakan indikasi kecenderungan sektarianisme dan etnosentrisme.

Dalam situasi sosial dan politik Indonesia, menyeruak juga kasus perusakan hutan dan pencemaran tanah dan air oleh limbah-limbah penambangan. Disinyalir terjadi juga penguasaan lembaga legislatif oleh kelompok pemodal besar yang mendorong deregulasi ekonomi yang lebih menguntungkan mereka. Ini merupakan indikasi dari kecenderungan dominannya kekuasaan sekelompok pemilik modal yang digerakkan oleh naluri ekonomi semata. Itu semua menjadikan Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap konflik sosial.

Kesulitan dan Kemalangan Sosial

Kesulitan dan kemalangan sosial (padanan kasar dari *social adversity*) masih banyak terjadi di Indonesia. Di antaranya kita temukan anak balita (0-4) dan anak (5-18) terlantar, wanita rawan sosial ekonomi (berusia 19-59 tahun belum menikah atau janda tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari), korban tindak kekerasan termasuk anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tak layak huni, korban bencana alam yang terlantar, korban bencana sosial atau pengungsi, pekerja migran bermasalah sosial, kelompok yang terkena stigma, dan orang yang dikucilkan karena keberbedaannya. Pengalaman mendapatkan kesulitan dan kemalangan sosial bisa memiliki efek psikologis negatif, salah satunya yang banyak ditemukan dalam studi psikiatri

dan psikologi adalah psikosis. Efek psikologi itu nantinya akan menghasilkan masalah sosial baru.

Mengurangi kesulitan dan kemalangan sosial merupakan satu persoalan yang penting untuk dikaji oleh psikologi sosial. Meskipun berakar pada struktur dan relasi sosial, serta terkait juga dengan masalah politik, aspek psikologisnya sangat kental. Bagaimana mengatasi, menghilangkan, dan mencegah kesulitan dan kemalangan sosial perlu menjadi kepedulian psikologi sosial.

Riset Psikologi Sosial yang Dibutuhkan

Pemaparan empat kondisi yang masih kurang ini, tentu saja, bukan untuk membuat kita menjadi pesimistik. Justru, tujuannya adalah agar kita lebih antisipatif dan memiliki optimisme dalam mengatasi persoalan-persoalan itu. Riset terhadap pelbagai ihwal itu diperlukan baik sebagai langkah antisipatif, langkah pencegahan, maupun langkah penanganan masalah. Riset perlu dilakukan agar kita memperoleh pemahaman dan kemampuan mengubah kondisi aktual menjadi kondisi yang lebih baik, dan kemudian mencapai kondisi ideal. Berikut ini gagasan mengenai riset psikologi sosial yang dibutuhkan Indonesia.

Riset Terkait dengan Perubahan Pasar Kerja

Terkait dengan perubahan pasar kerja, diperlukan riset-riset tentang fleksibilitas kerja yang dikaitkan dengan peningkatan kualitas kinerja yang komprehensif, kesiapan menerima, menyerap dan memanfaatkan teknologi, kepemimpinan dalam situasi yang tak tentu, dan tingkah laku inovatif. Dengan riset-riset mengenai topik ini, diharapkan sebagian masalah dapat teratasi di masa depan.

Fleksibilitas dalam pekerjaan mencakup kemampuan dan kemampuan agar dengan cepat merespons keadaan dan harapan yang berubah. Menjadikan para pekerja Indonesia fleksibel dalam bekerja sangat penting dan berharga. Untuk itu, perlu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menjadi determinan dari fleksibilitas kerja. Riset tentang ini dapat membantu kita memahaminya. Fleksibilitas juga terkait dengan kesiapan menerima, menyerap, dan memanfaatkan teknologi. Ini terkait dengan sikap kerja dan kinerja yang harapannya ditampilkan para pekerja sebagai respon terhadap perubahan pasar kerja yang dipengaruhi oleh perubahan faktor teknologi dan demografi. Perlu dipikirkan juga bagaimana membantu para pekerja yang kecewa dan takut bahwa pendapatan mereka dan anak-anak mereka akan terus mandek di masa depan, terutama kelas menengah yang semakin mengalami perasaan tidak puas dan tidak adil.

Riset tentang kepemimpinan di situasi tak tentu penting bagi Indonesia untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang dapat mengatasi kejadian tak terduga dan membawa bawahannya melewati situasi yang canggung-perenang. Sejalan dengan itu,

dalam upaya untuk menghasilkan orang-orang yang siap menghadapi pasar kerja di masa depan, diperlukan riset mengenai profil kepribadian untuk "micro-targeting" yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja, terciptanya hubungan sosial yang harmonis, serta efektifnya pembelajaran dan pendidikan. Kepimpinan masa depan membutuhkan teknologi dalam mengelola dan membawa bawahan ke arah produktivitas tinggi, hubungan sosial harmonis, dan kesejahteraan.

Lalu, riset tentang tingkah laku inovatif dapat memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor perilaku inovatif sehingga dapat menjadi dasar bagi usaha menghasilkan orang-orang yang inovatif. Dengan pemahaman terhadap tingkah laku inovatif disertai pemahaman mengenai kesiapan menghadapi situasi tak tentu di masa depan dan kepemimpinan yang tepat, psikologi sosial dapat membantu Indonesia mengatasi masa-masa sulit dan maju dengan baik di masa depan.

Riset Terkait dengan Birokrasi

Kebutuhan akan riset mengenai organisasi yang sejahtera dibarengi dengan riset mengenai psikologi dalam dunia birokrasi mendesak untuk dipenuhi. Indonesia yang hendak melakukan perbaikan birokrasi dan meningkatkan efisiensi kerja orang-orang di dalamnya perlu memiliki organisasi yang sejahtera dan kualitas birokrasi yang baik. Di level individual, dibutuhkan riset mengenai karakter yang sesuai dengan kinerja birokrasi yang efisien. Mengingat perubahan terus terjadi secara cepat, diperlukan juga pemahaman mengenai pembelajaran dan pengembangan untuk menghasilkan kinerja yang memadai pada orang yang bekerja di pemerintahan.

Pengembangan riset dalam area psikologi kerja mencakup internalisasi etos kerja atau komposisi dan interaksi orang dalam kelompok pekerjaan yang menunjang produktivitas kerja juga sangat dibutuhkan dalam konteks birokrasi di Indonesia. Berbarengan dengan itu, dibutuhkan juga riset mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi (khususnya birokrasi) serta riset mengenai sistem yang memastikan orang-orang di birokrasi bekerja secara memadai.

Terkait dengan demokrasi, diperlukan riset mengenai pembuatan keputusan kolektif untuk menghasilkan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Birokrasi dan demokrasi perlu berjalan beriringan. Perlu dikaji bagaimana birokrasi yang memberi keleluasaan partisipasi warga dapat berjalan baik. Pemahaman mengenai interaksi birokrasi dan partisipasi warga dapat menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang partisipatoris demi berlangsungnya kesejahteraan yang diperlukan.

Riset Terkait dengan Situasi Sosial-Politik dan Pencegahan Potensi Konflik

Untuk dapat mengelola situasi sosial-politik Indonesia dengan potensi konfliknya, diperlukan pemahaman dan penjelasan ilmiah mengenai faktor-

faktor yang berperan di dalamnya. Dalam kaitannya dengan itu, diperlukan riset mengenai penyebaran informasi melalui jejaring sosial. Para ilmuwan psikologi sosial perlu memanfaatkan teori dan temuan-temuan empirik mengenai peran jejaring sosial dalam menghasilkan sikap dan pola tingkah laku untuk menjalankan riset-riset itu.

Untuk menghasilkan masyarakat dengan komunitas-komunitasnya yang positif diperlukan riset mengenai komunitas yang sejahtera, kerja sama, mentalitas sosial, peran norma sosial, dan keadilan sosial. Riset mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di tataran individual maupun kelompok diperlukan, berbarengan dengan riset mengenai partisipasi warga. Pemahaman lebih mendalam mengenai perilaku demokratis memerlukan lebih banyak kajian mengenai psikologi dan demokrasi, serta mengenai kaitan psikologi dan hukum.

Riset Terkait Isu Lain

Dalam konteks organisasi dan pengelolaan kehidupan bersama di tataran komunitas, diperlukan riset mengenai peralihan dari perspektif individual ke perspektif kerja sama kelompok. Dalam perkembangannya sekarang, manusia memerlukan kerja sama untuk keberlanjutan dan pengembangan hidupnya. Sendirian, kita tidak memiliki perlengkapan untuk bertahan hidup di dunia. Kerja sama adalah kekuatan kita. Namun, kerja sama dalam bentuk apakah yang efektif bagi masyarakat kita? Para ilmuwan psikologi sosial perlu melakukan riset mengenai kerja sama yang efektif bagi orang Indonesia.

Lebih jauh lagi, diperlukan riset mengenai sinergi manusia, alam dan teknologi, yang sangat terkait dengan tingkah laku pelestarian lingkungan. Para ilmuwan psikologi sosial juga perlu memahami bagaimana teknologi merevolusi praktik psikologi dan bagaimana psikologi memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan ilmunya demi kesejahteraan manusia.

Kesimpulan

Ada banyak tuntutan yang ditujukan kepada Indonesia sebagai sebuah negara dan itu semua memang didasari oleh alasan-alasan yang layak diindahkan jika Indonesia hendak maju. Namun, dalam kenyataannya masih ada kendala dan hendaya dalam memenuhi tuntutan itu. Para ilmuwan psikologi sosial di Indonesia dibutuhkan untuk ikut serta mengatasi kendala dan hendaya itu.

Riset-riset psikologi sosial dibutuhkan untuk memahami, menjelaskan, dan memperbaiki situasi Indonesia. Hasil riset psikologi sosial terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas masyarakat kita dan memenuhi tuntutan-tuntutan yang kini ditujukan kepada Indonesia. Di banyak negara, kita mendengar masyarakat belajar banyak dari riset psikologi sosial

dengan temuannya yang unik dan mengejutkan. Di Indonesia, kita berharap masyarakat akan belajar banyak dari riset psikologi sosial. Kita berharap, psikologi sosial menjadi pemeran utama dalam kemajuan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Akin-Ogundeji, O. (1991). Asserting psychology in Africa. *The Psychologist: Bulletin of the British Psychological Society*, 4, 2-4.
- Bandawe C. (2010). A brief history of social psychology and its contribution to health in Malawi. *Malawi medical journal: the journal of Medical Association of Malawi*, 22(2), 34-37. doi: 10.4314/mmj.v22i2.58788
- Blackler, F. (1984). Preface: The plan of the book. In F. Blackler (ed.), *c* (pp. ix-xiv). London: John Wiley & Sons.
- Buschini, F., Guimond, S. & Breakwell, G. (2010). Social issues and social psychology: Distinctive pathways in applying social psychology to resolve major social problems. *Revue internationale de psychologie sociale*, 23(2), 5-15. Diunduh dari <https://www.cairn.info/revue-internationale-de-psychologie-sociale-2010-2-page-5.htm>
- Daniarsyah, D. (2015). Bureaucratic political and neutrality of bureaucracy in Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, V (2), 85-93. doi: 10.34010/JIPSI.V5I2.229
- Fishbein, M. (1997). Predicting, understanding, and changing socially relevant behaviours: Lessons learned. In C. McGarty, S.A. Haslam (eds.), *The Message of Social Psychology* (pp. 77-91). Oxford: Blackwell.
- Jahoda, G. (1983). Has social psychology a distinctive contribution to make? In F. Blackler (ed.), *Social Psychology and Developing Countries* (pp. 21-31). London: John Wiley & Sons.
- Omari, I.M. (1983). Some oriental issues in the application of social psychology in Developing Countries. In F. Blackler (ed.), *Social Psychology and Developing Countries* (pp. 33-43). London: John Wiley & Sons.
- McGuire, W. J. (1997). Going beyond the banalities of bubbapsychology: A perspectivist social psychology. In C. McGarty, S.A. Haslam (eds.), *The Message of Social Psychology* (pp. 221-237). Oxford: Blackwell.
- Moghaddam F.M., Bianchi, C., Daniels, K., Apter, M.J., & Harré, R. (1999). Psychology and national development. *Psychology and Developing Societies*, 11, 121-141. doi: 10.1177/097133369901100201